

Conflicting Rules Between Leadership Clause and Aiding and Abetting Under Article 25 of The Rome Statute

Author:

Sabrina Nugrahani Salsabila

ABSTRACT

The amendment of the Rome Statute includes a prerequisite ‘leadership’ element to the individual criminal liability specifically for the Crime of Aggression. Article 25(3)*bis* of the Rome Statute requires for someone to be held liable, he or she shall control or direct military or political action of the aggressive state. On the other hand, aiding and abetting as mode of liability holds liability for those who only assist the principal perpetrator. This Legal Research seeks to analyze on the legal implications created by the two and on how to balance in the application.

This Legal Research is using a normative approach to explain the legal issue. Normative research focuses on legal data, not limited to laws and regulations, but also legal literatures relevant to the issue.

This Legal Research found that *first*, there is different level of control and *mens rea* interacted between leadership clause and aiding and abetting; second, there should be limitation on the leadership clause in order to applied both provisions in the Rome Statute.

Keywords: Rome Statute, Crimes of Aggression, Aiding and Abetting, Leadership Clause

***Konflik Antara Aturan Kepemimpinan dan Membantu Melakukan Kejahatan
Dalam Pasal 25 Statuta Roma***

Oleh:

Sabrina Nugrahani Salsabila

INTISARI

Amandemen Statuta Roma mencakup unsur ‘kepemimpinan’ sebagai prasyarat untuk pertanggungjawaban pidana individu yang diberikan khusus untuk Kejahatan Agresi. Pasal 25(3)bis mengharuskan seseorang untuk mengendalikan atau mengarahkan tindakan militer atau politik suatu negara yang bertindak agresif untuk dapat dianggap bertanggungjawab. Di sisi lain, membantu melakukan kejahatan sebagai bagian dari mode pertanggungjawaban, hanya mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas bantuannya terhadap kejahatan tersebut. Penelitian hukum ini berupaya untuk menganalisa implikasi hukum yang timbul akibat kedua aturan tersebut serta menjawab bagaimana mengatur keseimbangannya.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normative untuk menjelaskan masalah hukum yang ada. Penelitian normative berfokus pada data hukum, yang meliputi pada undang-undang dan peraturan serta literatur hukum yang relevan dengan masalah yang ada.

Penelitian hukum ini menemukan bahwa pertama, ada tingkat kontrol dan sifat batin yang berbeda antara aturan kepemimpinan dan membantu melakukan kejahatan; kedua, harus ada batasan yang diberikan untuk aturan kepemimpinan untuk tetap menerapkan kedua ketentuan dalam Statuta Roma.

Kata kunci: Statuta Roma, Kejahatan Agresi, Membantu Melakukan Kejahatan, Aturan Kepemimpinan.